

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suplai pasokan pangan yang cukup lancar menjadi tantangan ke depan di tengah pandemi *covid-19*. Menurut data Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi tahun 2019 diperkirakan sebesar 54,60 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 4,60 juta ton (7,76 %). Produksi besar pada tahun 2019 sebesar 31,31 juta ton sehingga terjadi penurunan sebesar 2,63 juta ton (7,75%). (Apriyanto, 2020)

Melihat data tahun lalu, antisipasi pemerintah harus diperlukan jika terjadi penurunan produksi pangan apalagi di masa krusial saat ini. Salah satunya dengan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian namun justru para petani sedang dihadapkan dengan kenyataan akibat imbas dari *Covid-19*.

Berbagai kebijakan *work from home*, pembatasan untuk beraktivitas keluar rumah namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi para petani yang berjuang digarda terdepan untuk menyediakan pangan nasional. Bulan Maret sampai April 2020 saat panen raya, para petani tetap harus pergi ke sawah, padahal sebagian besar pekerja di sektor pertanian berusia lanjut karena minimnya regenerasi petani muda di Indonesia.

Menurut data Sakerna Agustus 2019, terdapat 52,69% petani berusia 45 tahun ke atas dari hasil penelitian menyebutkan bahwa usia lansia sebagai salah satu kelompok paling berisiko terpapar *Covid-19*. Salah satu kunci agar ketahanan pangan terjaga, yaitu dengan memastikan para pelaku sektor pertanian sehat dan sejahtera.

Namun kenyataannya, petani di Indonesia masih tergolong miskin. Pada tahun 2019, BPS mencatat bahwa terdapat 49,41% rumah tangga miskin berasal dari sektor pertanian. Panen raya yang seharusnya menjadi harapan bagi para petani untuk terlepas dari kemiskinan atau hanya sekadar untuk bertahan hidup, sirna sudah akibat pandemi *Covid-19*. Hal itu dikarenakan adanya gangguan proses distribusi hasil produksi serta adanya penurunan permintaan dari berbagai tempat seperti warung makan atau *restaurant*.

Per April 2020, terdapat rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani mengalami penurunan secara drastis sebesar 6,82% dari Rp 4.936 menjadi Rp 4.600 per kilogram sementara pada tingkat penggilingan terjadi penurunan dari 6,73% dari Rp 5.030 menjadi Rp 4.692 per kilogram. Harga produk pertanian yang diterima petani mengalami penurunan sedangkan harga kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan.

Tercatat inflasi per April 2020 terdapat sebesar 0,08% yang mana menyebabkan daya beli masyarakat menurun, termasuk para petani. Sumber utama yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah terdapat beberapa kenaikan harga bawang merah, gula pasir, beras, daging sapi, papaya, minyak goreng, rokok kretek filter, rokok putih, emas perhiasan, serta bahan bakar rumah tangga. Keadaan tersebut mempengaruhi terhadap kesejahteraan petani.

Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari penurunan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang cukup besar mencapai 1,73% dibandingkan dari bulan sebelumnya menjadi 100,32 pada April 2020. Seluruh subsektor pertanian juga mengalami penurunan, yaitu Nilai Tukar petani

(NTP) subsektor tanaman pangan turun sebesar 2,48%, subsektor hortikultura turun 1,18%, subsektor perkebunan rakyat turun 2,48%, subsektor peternakan turun sebesar 1,76%, dan subsektor perikanan turun sebesar 1,59%.

Sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sekitar 27,33 persen penduduk usia kerja bekerja sehingga menyelamatkan para petani dari dampak luas akibat pandemic Covid-19 harus dilakukan, terlebih lagi. Sebagian besar petani merupakan usia rentan berisiko tertular *Covid-19* tubuh petani yang sehat akan mempengaruhi keberlangsungan produksi pangan.

Sosialisasi harus dilakukan walaupun tanpa tatap muka serta mematuhi protokol Kesehatan *Covid-19* kepada para petani tentang pencegahan penyebaran virus *Covid-19* dan hal apa saja yang harus dilakukan ketika mengalami gejala tertular *Covid-19* sehingga perlu adanya penyuluhan di samping penyuluhan tentang pertanian.

Pemerintah telah mendistribusikan dana besar untuk jaring pengaman sosial seperti program keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial lainnya dalam upaya mitigasi dampak *Covid-19*, namun bantuan yang memprioritaskan para petani masih sedikit. Permodalan menjadi permasalahan utama para petani apalagi disaat seperti ini, sehingga perlunya adanya stimulus dari pemerintah kepada para petani seperti bibit dan pupuk bersubsidi untuk menekan harga pokok produksi petani.

Intervensi yang perlu dilakukan untuk mengatasi penurunan drastis harga produk pertanian seperti gabah, yaitu dengan mematok harga GKP di atas harga pasar sehingga akan memperbaiki kesejahteraan petani, memperlancar distribusi produk pertanian dari sentral pertanian ke non pertanian agar produk pertanian tidak terbuang sia-sia akibat adanya pembatasan sosial dan

sebagai stabilisator harga di daerah sentral non pertanian akibat adanya *panic buying* sehingga terjadi kelangkaan.

Menurut Badan Meterologi dan Geofisika, Ketersediaan daya dukung infrastuktur pertanian seperti saluran irigasi dikarenakan Indonesia telah memasuki musim kemarau pada pertengahan Bulan April dan puncaknya pada Bulan Agustus 2020, sehingga permasalahan kekurangan air dapat segera teratasi dan hasil panen terjaga sehingga stok pangan akan aman dan terkendali.

Jaminan kesejahteraan petani haruslah menjadi salah satu prioritas pemerintah, agar suplai pangan tidak mengalami gangguan. Pembangunan sektor pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Dimana penerapannya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani saja, melainkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan melalui perbaikan (*impreovement*), pertumbuhan (*growth*), dan perubahan (*change*). Salah satu permasalahan ekonomi, yaitu munculnya dampak akibat adanya industrialisasi yang tidak berbasis pada sektor pertanian. Dapat dilihat dari laju pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan laju sektor industri. Negara maju seperti Jepang, China, Eropa diawali dengan revolusi pertanian. Analisis dari segi permintaan, apalagi sektor pertanian kuat, maka pendapatan riil perkapita akan mengalami peningkatan, permintaan petani akan produk industri manufaktur akan mengalami kenaikan, sehingga akan terjadi perkembangan pada industri manufaktur. Jika dari segi penawaran, permintaan produk pertanian sebagai bahan baku oleh industri manufaktur, apabila terjadi kelebihan output sektor pertanian, maka menjadi investasi sektor industri manufaktur seperti industri kecil di pedesaan. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia.

Tabel 1. 1 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB

No.	Sektor Ekonomi	2013	2014	2015
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	13,90	13,94	13,98
2.	Pertambangan dan penggalian	13,58	13,59	13,54
3.	Industri pengolahan	14,39	14,43	14,47
4.	Pengadaan listrik dan gas	11,39	11,45	11,46
5.	konstruksi	13,56	13,63	13,69
6.	Perdagangan besar dan eceran	13,93	13,98	14,00
7.	Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	13,39	13,47	13,56
8.	Jasa dunia usaha	13,42	13,48	13,55
9.	Jasa sosial masyarakat	11,35	11,42	11,49
10.	Lain-lain	11,72	11,81	11,88
Produk Domestik Bruto		130,63	131,20	

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

Sektor pertanian di Indonesia memiliki banyak keunggulan komparatif dalam persaingan dunia. Hasil sumber daya pertanian yang beragam dan melimpah, haruslah didukung dan dikembangkan dengan kebijakan yang menstimulus pengembangan pertanian ke arah yang lebih kompetitif. Kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari sektor pertanian. Sumbangan PDB sektor pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 13,94% dan tahun 2017 mencapai 13,98%. Namun banyak permasalahan yang muncul yang sedang dihadapi oleh sektor pertanian, yaitu minimnya permodalan. Pembangunan pertanian untuk meningkatkan pendapatan usahatani dengan meningkatkan produktivitas usahatani dan nilai tambah produk, dan pendistribusian hasil pertanian memerlukan pendanaan berupa pembiayaan modal kerja. Pembiayaan pertanian yang ada selama ini dinilai kurang efektif karena terdapat sistem bunga yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dijadikan sebagai tambahan pengembalian, adanya kesenjangan antara debitur (pihak peminjam) dengan kreditur (pihak pemberi dana) dimana

mereka tidak bersinergi karena pihak kreditur bergerak disektor moneter sedangkan debitur bergerak dalam kegiatan sektor riil. Skema pembiayaan bank lebih kepada sektor nonpertanian, sedangkan untuk sektor pertanian jumlah kredit yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Pihak perbankan belum bisa mendukung secara optimal dalam peningkatan pengadaan jumlah penyaluran kredit dan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal kepada sektor pertanian terutama para petani kecil.

Tabel 1. 2 Presentase Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

No.	Sektor Ekonomi	2013	2014	2015
1.	Pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian	1,15	8,15	8,96
2.	pertambangan	1,10	8,43	8,72
3.	perindustrian	1,80	9,50	9,80
4.	Listrik, gas, dan air	1,54	8,61	8,77
5.	konstruksi	2,03	9,36	9,32
6.	Perdagangan, restoran, dan Gudang	2,66	10,03	10,17
7.	Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	1,68	9,41	9,31
8.	Jasa dunia usaha	3,86	8,94	9,14
9.	Jasa sosial/masyarakat	2,59	7,47	7,84
10.	Lain-lain	4,38	9,13	9,03
Jumlah		1,84	936,09	4.070.10

Sumber : Statistik Perbank Syariah, 2016

Adanya alokasi ketimpangan pembiayaan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor pertanian dalam pengembalian pembiayaan, tetapi aturan main kredit yang masih sangat kaku menjadi penyebab utamanya. Para petani terlilit hutang kepada rentenir mengakibatkan tidak tumbuhnya sektor pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dikarenakan tidak ada alternatif pembiayaan yang lebih tidak membebani petani. Dari segi pengolahan hasil-hasil produksi, penyimpanan, pemasaran adanya pembiayaan akan saat diperlukan.

Philanthropy (filantropi) dalam kamus, kata “*philanthropy*” dapat diartikan sebagai kedermawanan (Echols J dan Shadily, 1985). Kegiatan langsung dari kedermawanan sudah dikenal dan diterapkan sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nusantara. Beberapa kajian menunjukkan bahwa penerapan kedermawanan telah diterapkan sejak ratusan tahun yang lalu.

Yang mana sudah diterapkan oleh suku-suku di Indonesia dan menjadi bagian dari ajaran berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia.

Ada tradisi jimpitan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, merupakan sebuah penerapan dari kedermawanan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan menyisihkan beras setiap malam dan setiap malamnya akan diambil oleh petugas ronda malam. Beras yang telah dikumpulkan akan disumbangkan disaat ada kegiatan sosial lingkungan atau diberikan kepada warga yang sedang terkena musibah.

Penerapan filantropi sudah menjadi bagian dari ajaran dan kegiatan keagamaan di Indonesia, dalam agama Islam terdapat kegiatan filantropi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Awal mulanya muncul pada tahun 1990an, dikenal sebagai momentum perkembangan filantropi di Indonesia dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi lalu diikuti krisis politik dan berujung pada turunnya rezim Order Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan pada saat itu dengan terdapat bencana alam seperti gempa, kebakaran hutan, tanah longsor, dan tsunami, terjadi secara beruntun di wilayah Indonesia.

Perkembangan filantropi pada saat tahun 1990-an dapat ditandai dengan munculnya media massa sebagai institusi efektif dalam mendorong. Gerakan kepedulian disertai kedermawanan masyarakat. Televisi, radio, maupun surat-surat tidak hanya menjadi media informasi dan hiburan, namun juga menjadi berperan dalam penggalangan dan penyaluran dana sosial melalui program “dompet” dan “peduli”. Filantropi sudah berperan dalam mengentaskan kemiskinan. (Tamin,2011).

Tidak hanya media, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) ikut serta dalam mengembangkan filantropi di Indonesia. OPZ sebagai gerakan dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan kesadaran masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ini sebagian

telah dibentuk oleh pemerintah yang dikenal dengan BAZ (Badan Amil Zakat) dan yang lainnya didirikan oleh beberapa organisasi massa (ormas) Islam yang dikenal dengan sebutan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang berupaya untuk menggalang, mengelola zakat secara professional dengan strategi penggalangan sumber daya modern.

Dana filantropi Islam yang didapatkan dari zakat sangat berpotensi untuk memajukan ekonomi umat karena didalam ajaran Agama Islam memiliki konsep zakat sebagai suatu bentuk kepedulian orang yang mempunyai harta yang berlebih kepada orang yang membutuhkan untuk memisahkan jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta mengangkat mereka dari kemiskinan, mencegah mereka dari kelaparan dan kesengsaraan, bahkan dapat merubah mustahik untuk menjadi muzaki.

Terdapat pesan Rasulullah SAW “*Aghunum fi hadza al-yaum*”, yang berarti bikin kaya para fakir miskin itu dengan harta zakat yang terkumpul pada hari ini. Zakat merupakan bagian dari harta dengan ketentuan dan syarat tertentu yang mana Allah SWT telah mewajibkan pemiliknya untuk menyerahkan kepada mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat dijadikan modal sosial untuk membangun ekonomi umat.

Dari segi program, perkembangan filantropi di Indonesia memiliki program-program yang ditawarkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung dan menyumbang program mereka. Hasil riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan FEM IPB dalam Salman Nashir (2017) menyatakan bahwa potensi zakat nasional telah mencapai 3,4% dari PDB atau sebesar 217 triliun. Studi CSRC UIN Jakarta (2015) juga mengungkapkan bahwa dana filantropi sudah mencapai 19,3 triliun/tahun, namun Ahmad Juwaini mengatakan bahwa 30 hingga 50 persen dana zakat yang sudah terkumpul oleh Lembaga pengelola zakat hanya digunakan untuk program konsumtif, ia juga mengatakan bahwa sekitar 450 lembaga pengelola zakat di Indonesia dapat

mengumpulkan dana sebesar Rp 860 Miliar per tahun, saat disayangkan dana zakat Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar hanya digunakan untuk program konsumtif dan belum digunakan untuk program-program pemberdayaan.

LazisMU (Lemabga Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) merupakan salah satu Lembaga filantropi Islam yang memiliki inovasi untuk menjawab tantangan pengoptimalan potensi dana zakat dengan salah satu programnya, yaitu *Pilot Project* atau gerakan tani bangkit yang telah diresmikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohir di Desa Gempol, Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Gerakan ini sebagai inovasi untuk menunjukkan kepada masyarakat dakwah dan zakat memiliki makna yang luas. Menurut Ketua MEK PDM Klaten, pemberian modal dalam projek tani bangkit menggunakan skema *qardhul-hasan* dimana petani tidak terbebani bagi hasil dan angsuran, justru mereka akan mendapatkan pendampingan untuk menunaikan zakat pertanian produktif. (admin, 2018) Lantas apakah dengan skema pembiayaan ini sudah efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjawab tantangan optimalisasi zakat di Indonesia? Dalam penelitian ini akan menggunakan metode, yaitu analisis *mix methode* dan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Pemilihan metode *Mix Methods* didasarkan atas penelitian-penelitian sebelumnya yang efektif sehingga dapat mengetahui pola penyaluran pembiayaan *qardhul-hasan* dan dapat mengukur efektivitas program dengan menambahkan analisis SWOT yang digunakan untuk menentukan posisi program saat ini dengan memperhatikan beberapa faktor internal dan faktor eksternal program. Proses analisis SWOT dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui efektivitas program untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga program dapat ditetapkan sebagai program berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor yang sudah ditentukan. Harapannya dengan penelitian ini dapat membantu pihak penyelenggara program Lazismu dengan MEK PDM Klaten

untuk melakukan monitoring evaluasi dalam memaksimalkan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Gempol, Klaten. Hal ini akan peneliti bahas dalam penelitian ini :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana pola penyaluran pembiayaan *qardhul-hasan* kepada petani?
2. Apakah skema pembiayaan pembiayaan *qardhul-hasan* efektif dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Mengetahui pola penyaluran pembiayaan *qardhul-hasan* kepada petani.
2. Mengetahui apakah skema pembiayaan pembiayaan *qardhul-hasan* efektif dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai pembiayaan *qardhul-hasan*.
2. Memberikan informasi mengenai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembiayaan *qardhul-hasan*.
3. Memberikan informasi mengenai program kegiatan yang sesuai pada kelompok tani agar pembiayaan *qardhul-hasan* dapat digunakan secara optimal.

